

PENERAPAN PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM RAHASIA KEDOKTERAN PASIEN HIV/AIDS DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum
Minat Utama : Hukum Kesehatan



Disusun oleh:

**Wahyu Indianto
NIM. S301502009**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET


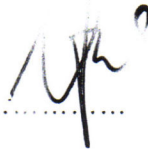
SURAKARTA

2017

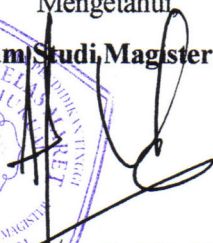
**PENERAPAN PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM RAHASIA KEDOKTERAN
PASIEH HIV/AIDS DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA**


Disusun oleh:
Wahyu Indianto
NIM. S301502009

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing :

| Jabatan | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
|---------------|---|--|--------------|
| Pembimbing | <u>Dr. Isharyanto, SH, M.Hum</u> NIP. 19780501 200312 1 002 |  | 10/7 2017 |
| Co Pembimbing | <u>Dr. Emmy Latifah, SH, MH</u> NIP. 19800819 200501 2 001 |  | 12 Juli 2017 |

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

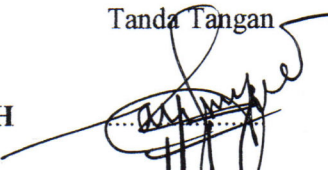
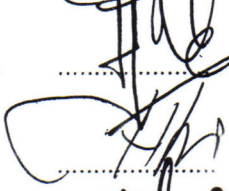
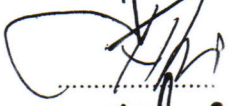
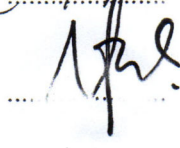

Dr. Hari Purwadi, SH, M. Hum
NIP. 19641201 200501 1 001



**PENERAPAN PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM RAHASIA KEDOKTERAN
PASIEH HIV/AIDS DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA**

Disusun oleh:
Wahyu Indianto
NIM. S301502009

Telah Disetujui oleh Tim Penguji

| Jabatan | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
|------------|----------------------------|--|--------------|
| Ketua | Dr. Arief Suryono, SH, MH |  | W. VII. 2017 |
| Sekretaris | Dr. Hari Purwadi, SH, MHum |  | 14/7-2017 |
| Anggota | Dr. Isharyanto, SH, M.Hum |  | 10/7-2017 |
| Penguji | Dr. Emmy Latifah, SH, MH |  | 12 Juli 2017 |

Mengetahui

Direktur Program

Pascasarjana,



Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah M.Pd.

NIP. 196007271987021001

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum,



Dr. Hari Purwadi, SH, MHum

NIP. 196412012005011001

PERNYATAAN

Nama : Wahyu Indianto

NIM : S301502009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “**PENERAPAN PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM RAHASIA KEDOKTERAN PASIEN HIV/AIDS DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA**”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila benar dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian tesis saya, dengan ini saya bersedia di-*upload* atau dipublikasi *website* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Surakarta,

Yang Membuat Pernyataan

WAHYU INDAINTO

KATA PENGANTAR

Atas berkah rahmat Allah yang maha kuasa tesis yang berjudul “**PENERAPAN PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM RAHASIA KEDOKTERAN PASIEN HIV/AIDS DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA**” ini dapat penulis selesaikan guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tesis ini membahas tentang Rahasia Kedokteran dalam program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, dengan melihat penerapan prinsip keseimbangan dalam pelaksanaannya. Dalam kesempatan ini, penulis juga bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara materiil maupun moril sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr Ravik Kasidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Furqon Hidayatullah M.Pd, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Dr. Hari Purwadi, SH. M Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
5. Bapak Dr. Isharyanto, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah sangat sabar memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, koreksi dan masukan serta diskusi yang memperkaya bagi kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Ibu Dr. Emmy Latifah , SH, MH , selaku Pembimbing II yang telah sangat sabar memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, koreksi dan masukan serta diskusi yang memperkaya bagi kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik dan lancar.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Sudi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unversitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya dengan penuh dedikasi dan keikhlasan sehingga menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

8. Bapak dan Ibu Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
9. Ibu dr Siti Wahyuningsih, MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta sekaligus teman kuliah, yang telah membantu, mendukung dan memberikan semangat sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan lancar.
10. Bapak dr. Willy Handoko Widjaja, MARS, Direktur RSUD Kota Surakarta yang telah membantu dan memebrikan ijin sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik .
11. Teman-teman Dinas Kesehatan dan Puskesmas dan RSUD Kota Surakarta, yang telah membantu sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tesis dengan baik dan lancar.
12. Istri dan anak-anakku sumber inspirasi dan semangat yang tak pernah kering tercinta
13. Teman-teman seangkatan kelas Hukum Kesehatan yang telah memberikan semangat dan doa sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tesis dengan baik dan lancar.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik membangun demi perbaikan pada masa yang akan datang dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surakarta,

Penulis

Wahyu Indianto

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI..... | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| ABSTRAK..... | xi |
| ABSTRACT | xii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Peneitian | 9 |
| BAB II. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR..... | 11 |
| A. Tinjauan Rahasia Kedokteran | 11 |
| B. Tinjauan Mengenai HIV/AIDS | 17 |
| C, Teori Bekerjanya Sistem Hukum | 33 |
| D. Penelitian yang relevan | 36 |
| E. Kerangka Berpikir | 38 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 39 |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 39 |
| B. Definisi Operasional | 40 |
| C. Data Penelitian..... | 40 |
| D. Teknis Pengumpulan Data | 40 |

| | |
|--|-----|
| D. Analisis Data | 40 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 42 |
| A. Hasil Penelitian | 42 |
| B. Pembahasan..... | 91 |
| BAB V. PENUTUP | 104 |
| A. Kesimpulan..... | 104 |
| B. Implikasi | 105 |
| C. Saran | 106 |
| A. DAFTAR PUSTAKA | 108 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------------------------|----|
| Gbr. 4.1 Empat Type Stigma | 64 |
| Gb. 4.2 Proses Stigma | 65 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Cascade ART Nasional sd Maret 2016 | 3 |
| Tabel 4.1. Perkiraan Jumlah Infeksi Baru pada Sub Grup per tahun | 45 |
| Tabel 4.2. Jumlah Kasus HIV/AIDS di Indonesia dalam Tahun | 60 |

ABSTRAK

Wahyu Indianto, S301502009, Penerapan Prinsip Keseimbangan Dalam Rahasia Kedokteran Pasien HIV/AIDS Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia.

Tesis : Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan makna prinsip keseimbangan rahasia kedokteran pasien HIV/AIDS serta menganalisis konstruksi ideal penerapannya di Indonesia. Jenis penelitian ini penelitian normatif dengan sumber data dari sumber hukum dan non hukum khususnya tentang rahasia kedokteran dan HIV/AIDS

Rahasia Kedokteran tidak berubah sesuai Sumpah Hippocrates termasuk dalam rahasia pasien HIV/AIDS. Penerapan Rahasia pasien HIV/AIDS berkembang dalam menyesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat dan dunia kedokteran. Wajib simpan rahasia ini bukanlah suatu kewajiban yang mutlak tetapi suatu yang bersifat *prima facie*, sampai ada kewajiban yang lebih besar yang harus dijalankan seperti untuk melindungi pasangan seksual penderita HIV/AIDS atau untuk melindungi kepentingan masyarakat. Asas keseimbangan ini merupakan asas yang berlaku umum. Keseimbangan Rahasia Kedokteran berupa kepastian perlindungan bagi manusia, dalam hal ini tenaga kesehatan/dokter dan ODHA serta juga harus bisa memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu pada keadaan semula. Perkembangan makna keseimbangan Rahasia Kedokteran pada penderita HIV/AIDS telah berlangsung dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS yang terwujud dalam prinsip-prinsip yang memuat persetujuan tindakan (consent), kepastian kerahasiaan (confidentiality), kepastian diagnosis (*Correct Test*) dengan konsekuensi pemberian layanan kesehatan (*Connect to*) yang berupa Perawatan Dukungan Terapi (*Care Support and treatment*). Prinsip-prinsip layanan ini dilaksanakan dengan komprehensif dan berkesinambungan.

Konstruksi ideal keseimbangan rahasia pasien HIV/AIDS merupakan upaya mengatasi masalah yang masih sensitif yang berupa masih tingginya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan populasi kunci yang merupakan hambatan untuk penurunan angka HIV/AIDS . Adanya peraturan yang bersifat punitif dan kriminal menyebabkan hambatan untuk melakukan pemeriksaan di layanan kesehatan. Peraturan-peraturan yang bersifat punitif ini sebaiknya ditinjau ulang atau dihapus demi mengurangi hambatan jangkauan pelayanan kesehatan pada kasus HIV/AIDS.

Implikasi perkembangan makna prinsip keseimbangan rahasia pasien HIV/AIDS mewajibkan pemerintah untuk memberikan layanan yang benar-benar lengkap mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Khususnya dalam pelayanan kuratif pemerintah wajib menyediakan layanan terapi obat HIV/AIDS bermutu , terjangkau dan berkelanjutan untuk terapi ODHA yang membutuhkannya seumur hidupnya.

Kata Kunci : Keseimbangan, Rahasia Kedokteran, HIV/AIDS

ABSTRACT

Wahyu Indianto, S301502009, Application of the Balancing Principle In The Medical Confidentiality of HIV / AIDS Patients In Indonesian Legislation.

Thesis: Master of Legal Studies, Sebelas Maret University Surakarta.

The purpose of the study are to analyze the development of the meaning of the principle of secret balance confidentiality medicine of HIV / AIDS patients and analyze the ideal construction of its application in Indonesia. It is normative research with sources of data from legal and non-legal sources especially about the confidentiality of medicine and HIV / AIDS

Medical Confidentiality does not change as Hippocrates Oath, including HIV/AIDS confidentiality. Application of the HIV/AIDS confidentiality develops in conformity with the development of values in society and medicine. The obligation to keep this secret is not an absolute obligation but a *prima facie*, until there is a greater obligation to be undertaken such as to protect the sexual partner or to protect the public interest. This principle of balancing is a generally principle. The Balance of Medical Confidentiality is a certainty of protection for humans, in this case health workers / doctors and PLWHA and also must be able to restore the balance of disturbed community order in the original state. The development of the meaning of the balancing of Medical Confidentiality in HIV/AIDS sufferers has taken place in the effort of combating HIV/AIDS embodied in the principles that include consent, confidentiality, diagnosis Correct Test with the consequence to Conect to health service to Care Support and Teratment. These service principles are implemented in a comprehensive and sustainable manner.

The ideal construction of the balancing HIV confidentiality is an effort to overcome the still-sensitive issues of high stigma and discrimination against PLHIV and the key population which is an obstacle to the decline in HIV / AIDS rates. The existence of punitive and criminal regulations causes barriers to test in health services. It's should be reviewed or deleted in order to reduce the barriers to the reach of health services in HIV/AIDS cases.

Keywords: Balancing, Confidentiality, HIV